

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, sektor pariwisata di Indonesia menjadi salah satu sektor unggulan dan masuk ke dalam tiga besar sektor penyumbang devisa negara yang didorong oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebagai negara kepulauan, potensi Indonesia untuk mengembangkan industri pariwisata sangatlah besar. Sejalan dengan regulasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menyebutkan bahwa pariwisata bersifat multidimensi sebagai kebutuhan setiap orang dan negara serta sebagai perwujudan antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta, wisatawan, dan masyarakat setempat.

Potensi sektor pariwisata terhadap devisa negara ini sangat menjanjikan. Semakin tinggi daya tarik sektor pariwisata akan berbanding lurus dengan meningkatnya mobilitas wisatawan pada objek wisata tersebut dan berdampak pula pada meningkatnya jumlah pendapatan negara sektor pariwisata. Pendapatan negara yang kian meningkat, memungkinkan kondisi kesejahteraan masyarakatnya juga ikut mengalami kenaikan. Meskipun keunggulan sektor pariwisata sangat tinggi, sektor ini juga memiliki kelemahan, yaitu adanya faktor bencana alam yang tidak bisa diprediksi waktu kejadiannya (Aliperti et al., 2018).

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia pada Tahun 2020-2021**



Sumber: Dokumen Pusdatin Statistik Wisatawan Mancanegara (<https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara> diakses pada 2 September 2022)

Berdasarkan statistik kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari seluruh pintu masuk transportasi, pada tahun 2020 jumlah kunjungan tertinggi, yaitu pada bulan Januari 2020 dengan jumlah 1.290.411 kunjungan. Kemudian, pada bulan Februari 2020 – Desember 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari setiap bulannya karena pandemi Covid-19 (Kemenparekraf, 2021). Namun pada akhir tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan jumlah kunjungan sebesar 163.619 karena menjadi masa transisi *new normal* yang pada saat itu pemerintah mulai melonggarkan berbagai sektor untuk dapat berjalan seperti biasanya.

Indonesia sebagai negara kepulauan, juga termasuk ke dalam negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Garis pantai adalah garis yang memanjang di pesisir laut dan adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Di bawah ini adalah data penunjang yang diperoleh peneliti.

**Tabel 1.1 Negara dengan Garis Pantai Terpanjang di Dunia**

<b>Nama Negara</b>	<b>Panjang Garis Pantai (km)</b>
<b>Kanda</b>	202.080
<b>Indonesia</b>	99.083
<b>Norwegia</b>	58.133
<b>Rusia</b>	37.653
<b>Filipina</b>	36.289
<b>Jepang</b>	29.751

*Sumber: Dokumen tabel dalam angka World Population Review  
(<https://worldpopulation.com> diakses pada 2 September 2022)*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua yang memiliki panjang garis pantai sebesar 99.083 km. Tidak diragukan lagi bahwa sektor pariwisata bahari di Indonesia sangat beragam dan menyebar di seluruh pulau. Hal tersebut juga berdampak pada kekayaan alamnya yang sangat melimpah yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakatnya sebagai sumber pendapatan negara melalui sektor pariwisata.

Berdasarkan bentuk geografis Indonesia yang dikelilingi laut, salah satu potensi sektor pariwisata, yaitu wisata bahari atau pesisir. Objek wisata yang sangat indah ini menjadi incaran wisatawan sebagai tempat rekreasi. Perkembangan kunjungan wisatawan yang semakin pesat, mempengaruhi perkembangan sarana penunjang tumbuh dengan pesat di pusat hunian wisata ataupun di kawasan objek wisata seperti misalnya rumah makan, *art shop*, pasar seni, sarana hiburan, dan rekreasi.

Wisata pesisir menjadi salah satu sektor unggulan di beberapa daerah di Pulau Jawa salah satunya, yaitu Kabupaten Tegal. Secara geografis, Kabupaten Tegal terbentang dari Laut Jawa pada bagian utara sampai kaki Gunung Slamet di bagian selatan. Sebagian besar wilayahnya berada di dataran rendah yang

dikelilingi pegunungan dan beberapa wilayahnya meluas hingga daerah pesisir mencapai perbatasan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes. Di daerah pesisir terdapat objek wisata potensial di Kabupaten Tegal. Salah satunya, yaitu Pantai Purwahamba Indah atau yang lebih dikenal dengan Pantai Pur'in. Pantai Pur'in menjadi salah satu objek wisata potensial yang terletak di Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Letaknya yang strategis berada di jalur utama Brebes – Tegal – Pemalang menjadi poin plus karena kemudahan aksesnya.

Pengelolaan dan pengembangan Pantai Pur'in berada di bawah naungan pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporapar). Disporapar bekerja sama dengan sektor swasta melalui PT Bintang Permata Kharisma atau sering disebut dengan PT BPK serta masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Purwahamba. Hal tersebut sejalan dengan regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 7 Tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2025 disebutkan bahwa pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tegal dilaksanakan dalam bentuk skema kemitraan antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Ketiga *stakeholder* tersebut memiliki peran dan fungsi yang krusial dalam pengembangan objek wisata Pantai Pur'in. (1) Pemerintah, yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporapar) menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator dalam pembuatan regulasi kegiatan pembangunan pariwisata, mengawasi kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta

bertugas mempromosikan objek wisata Pantai Pur'in; (2) PT BPK sebagai sektor swasta menjalankan perannya sebagai investor pengembangan pariwisata dan menyediakan lahan serta sarana prasarana Pantai Pur'in yaitu kolam renang *waterboom* dan Taman Ria Permai Sosro; (3) Pokdarwis Pesona Bahari sebagai masyarakat lokal Desa Purwahamba menjalankan perannya sebagai pelaku pengembangan pariwisata dengan menjaga kebersihan dan keamanan wisata, menyediakan *homestay* dan berbagai tempat makan bagi pengunjung. Dalam pengembangan objek wisata Pantai Pur'in harus saling bersinergi semua *stakeholder*-nya baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

Namun melihat kondisi di lapangan, pengembangan objek wisata Pantai Pur'in tidak sejalan dengan peran dan fungsi masing-masing *stakeholder*. Di tengah tingginya persaingan sektor pariwisata yang gencar mempromosikan dan menggerakkan sektor pariwisata miliknya, Pantai Pur'in justru mengalami stagnasi dalam pengembangannya. Dampak yang terjadi, yaitu menurunnya daya tarik objek wisata. Perda Kabupaten Tegal No. 7 Tahun 2018 mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2018 – 2025 menjadi pedoman dalam pengembangan objek wisata Pantai Pur'in. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa dalam mewujudkan pembangunan pariwisata dibutuhkan sinergi Lembaga pariwisata baik melalui perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata.

Menilik kondisi tersebut, permasalahan pertama yang terjadi, yaitu tidak terealisasinya pengembangan pariwisata berdasarkan regulasi Perda Kabupaten

Tegal No. 7 Tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tegal.

**Gambar 1.2**  
**Kondisi Fasilitas Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti (3 Oktober 2022)*

Berdasarkan gambar 1.2 kondisi di lapangan, fasilitas dalam Pantai Pur'in ini justru berada dalam kondisi stagnan atau tidak adanya inovasi ke arah yang lebih baik dan cenderung monoton. Tidak adanya pembangunan fasilitas baru berdampak pada menurunnya daya tarik wisata tersebut. Apabila dibandingkan antara pengunjung wisatawan Pantai Pur'in dengan pengunjung objek wisata lain di Kabupaten Tegal terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Hal tersebut menimbulkan persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa Pemkab Tegal hanya fokus dalam objek wisata unggulan pemandian air panas Guci yang mana menyebabkan gap pengembangan objek wisata daerah pesisir dan daerah dataran rendah.

**Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Pengunjung Objek Wisata Pantai Purwahamba Indah dan Pemandian Air Panas Guci Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2021**

<b>Pantai Purwahamba Indah</b>		<b>Pemandian Air Panas Guci</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wisatawan (orang)</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wisatawan (orang)</b>
2016	188.052	2016	664.481
2017	191.569	2017	817.624
2018	164.379	2018	916.927
2019	140.979	2019	948.139
2020	51.440	2020	372.756
2021	52.844	2021	395.803

*Sumber: Dokumen Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal Arus Pengunjung Objek Wisata Kabupaten Tegal Tahun 2016-2021*

Tabel 1.2 menyatakan bahwa adanya perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah wisatawan pemandian air panas Guci dengan Pantai Purwahamba Indah. Pada tahun 2016 – 2018 pengunjung wisata Pantai Purwahamba Indah sangat fluktuatif cenderung menurun. Pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 70%, sedangkan pengunjung di Pemandian Air Panas Guci mengalami kenaikan dari setiap tahunnya secara signifikan (BPS, 2021). Kenaikan jumlah pengunjung objek wisata PAP Guci ini sejalan dengan gencarnya promosi melalui media sosial dan pembangunan fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah dan *stakeholder* yang terlibat.

Promosi objek wisata menjadi salah satu peran yang harus dilakukan oleh seluruh *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Pantai Pur'in. Namun realitanya, peneliti jarang sekali menemukan promosi objek wisata Pantai Pur'in

baik melalui media sosial maupun media cetak. Padahal dewasa ini, platform media sosial sebagai platform media promosi wisata yang sangat menjanjikan. Terobosan promosi ini harusnya digencarkan oleh seluruh *stakeholder* untuk meningkatkan jumlah wisatawan.

Menilik kondisi di atas maka permasalahan kedua yang terjadi, yaitu adanya ketimpangan keterlibatan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tegal. Peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam promosi dan pembangunan fasilitas objek wisata Pantai Pur'in masih sangat rendah. Promosi objek wisata menjadi salah satu cara untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan mengenalkan potensi wisata pesisir di Kabupaten Tegal dengan jangkauan yang lebih luas.

**Gambar 1.3**  
**Kondisi Anjungan di Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal**



*Sumber: Dokumen gambar Anjungan Pantai Purwahamba Rusak (<https://jateng.tribunnews.com> diakses pada 2 September 2022)*

Ketimpangan keterlibatan peran *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata secara garis besar dilihat dari kelayakan fasilitas yang ada. Di objek wisata Pantai Purwahamba Indah, fasilitasnya cenderung mengalami penurunan kelayakan karena kurangnya pemeliharaan, seperti MCK yang kotor, fasilitas

persinggahan atau tempat duduk tidak memadai, kondisi ayunan yang besarnya sudah berkarat, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya yang tidak memadai.

Salah satunya, yaitu anjungan yang memanjang ke tengah pantai seperti pada gambar 1.3 Kondisi anjungan selama pandemi Covid-19, atapnya sudah ambruk tepatnya di bagian tengah dan di tiap sisi tembok serta pembatas kayu juga rapuh sehingga sangat membahayakan bagi pengunjung (TribunJateng, 2022). Kemudian pada bulan April 2022, anjungan tersebut disepakati oleh pengelola Pantai Pur'in untuk dirobohkan sehingga menambah kesan kosong, monoton, dan mengurangi daya tarik pemandangan objek wisata Pantai Pur'in.

**Gambar 1.4**  
**Kondisi Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal yang Penuh dengan Sampah**



*Sumber: Dokumen gambar Kotornya Pantai Purwahamba  
(<https://portalbrebes.pikiran-rakyat.com> Diakses 2 September 2022)*

Selain fasilitasnya yang masih belum optimal pemeliharaannya, hal tersebut diperparah dengan ceceran sampah yang mencemari pesisir pantai. Dilansir melalui kanal berita Portal Brebes, dijelaskan bahwa banyak sampah yang berserakan di tepi pantai. Tidak adanya rambu-rambu terkait kebersihan di lingkungan objek wisata juga mempengaruhi kesadaran pengunjung. Hal tersebut

tentunya sangat mengganggu pengunjung saat menikmati keindahan Pantai Pur'in (Portal Brebes, 2022).

Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Pantai Pur'in, yakni mengawasi kegiatan pariwisata. Salah satu kegiatan pengawasannya, yaitu kepatuhan pengunjung terhadap kebersihan untuk menjaga lingkungan wisata tetap bersih dan sehat. Menilik kondisi tersebut, permasalahan ketiga yang terjadi, yaitu kurangnya kepedulian Disporapar dan Pokdarwis sebagai pengelola Pantai Pur'in. Selain itu, kontribusi masyarakat dalam hal promosi objek wisata juga masih sangat rendah karena tidak adanya sosialisasi masif dari pemerintah terkait promosi. Berdasarkan wawancara pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 28 Oktober 2022, masyarakat setempat mengatakan bahwa masih belum adanya program pemberdayaan masyarakat seperti program pelatihan.

Salah satu fasilitas yang didukung oleh swasta, yaitu PT BPK. Fasilitas ini berada di dalam Pantai Pur'in sehingga sangat memudahkan pengunjung yang ingin mengeksplorasi semua fasilitasnya. Namun, peran swasta dalam memfasilitasi sarana prasarana pendukung juga kurang optimal. Taman Ria Permai Sosro cenderung sepi pengunjung. Hal tersebut karena tidak adanya inovasi taman bermain tersebut dan tidak dilakukan pemeliharaan secara intensif.

**Gambar 1.5**  
**Fasilitas Taman Ria Permai Sosro**



*Sumber: Dokumentasi peneliti (3 Oktober 2022)*

Berdasarkan gambar 1.5 terlihat bahwa loket menuju Taman Ria Permai Sosro terlihat temboknya berlumut dan kurang terawat. Untuk harga tiket masuk Rp 35.000 pengunjung merasa tidak sebanding dengan fasilitas yang didapatkan walaupun didukung melalui kolam renang *waterboom*. Hal tersebut tentunya berdampak pada menurunnya daya tarik pengunjung untuk mengunjungi taman bermain tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayattuloh, dkk., pada tahun 2020, mengatakan bahwa kurangnya keterlibatan baik dari pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor swasta dalam mengembangkan potensi Pantai Purwahamba Indah (Hidayattuloh et al., 2020). Melalui penelitian tersebut, permasalahan keempat yang terjadi, yaitu hubungan antara *stakeholder* yang terlibat belum maksimal sehingga mengakibatkan stagnasi pengembangan objek wisata Pantai Pur'in. Padahal kerja sama dan sinergitas yang optimal antar *stakeholder* yang terlibat akan mendorong keberhasilan pengembangan Pantai Pur'in jauh lebih baik.

Teori sinergitas menurut Stephen Covey (2004 : 49) dalam bukunya yang berjudul *The Seven Habits of Highly Effective People*, sinergitas adalah proses saling melengkapi antar pihak yang terlibat untuk mencapai output yang lebih besar (Rusyadi et al., 2022). Adapun *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan objek wisata Pantai Pur'in, yaitu Disporapar Kab. Tegal, PT BPK, dan masyarakat melalui pengelola wisata dan Pokdarwis. Sinergitas *stakeholder* menurut Najiyati dan Rahmat (dalam (La'lang et al., 2022) dilihat melalui 2 cara, yaitu komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* untuk melihat keberhasilan pembangunan. Apabila sinergitas antar *stakeholder* terlaksana dengan optimal, dapat mencapai keberhasilan pengembangan Pantai Pur'in.

Berdasarkan pemaparan berbagai permasalahan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti sinergitas *stakeholder* yang meliputi Disporapar Kabupaten Tegal, PT BPK, serta masyarakat menjadi fokus utama dalam penelitian ini yang kemudian peneliti judul penelitian, yaitu **“Sinergitas Stakeholder dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

1. Pengembangan objek wisata Pantai Pur'in tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Tegal No. 7 Tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan melalui belum terealisasinya pembangunan sarana prasarana wisata yang inovatif.

2. Rendahnya dukungan pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengembangkan potensi Pantai Pur'in karena kurangnya pemeliharaan sarana prasarana, keterbatasan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sinergitas *stakeholder* tidak terwujud dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal?
2. Apa yang menghambat terwujudnya sinergitas *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Memahami tidak terwujudnya sinergitas *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal.
2. Memahami apa saja yang menghambat terwujudnya sinergitas *stakeholder* dalam mengembangkan objek wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan memperluas wawasan, pengalaman, dan dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini sebagai bentuk kontribusi akademik guna menambah khasanah keilmuan pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya berkaitan dengan topik sinergitas antara pemerintah dengan *stakeholder* lain.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat pula bagi pihak-pihak yang secara langsung terkait dalam penelitian ini.

#### **1. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rekomendasi ataupun pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam rangka pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal. Selain itu, menjadi bahan evaluasi Pemkab. Tegal agar lebih fokus serta optimal dalam pengembangan potensi daerah khususnya objek wisata.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat melalui Pokdarwis Pesona Bahari untuk ikut serta mendukung pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah sehingga dapat menghasilkan manfaat bersama melalui pemberian saran dan kritik terhadap kinerja, pelayanan, maupun program yang dibuat oleh pemerintah setempat.

## **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru dalam penelitian selanjutnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang peneliti kaji.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL/NAMA PENELITI	TUJUAN	TEORI DAN METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Sinergitas Pemangku Kepentingan Dalam Kerangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang  (Rusyadi et al., 2022)	Menganalisis sinergitas pemangku kepentingan melalui aspek koordinasi efektif dalam pengembangan Ekraf di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang	<b>Teori:</b> Teori sinergitas menurut Covey (2004)  <b>Metode:</b> Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas yang diupayakan oleh pemangku kepentingan dalam pengembangan ekraf Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang masih belum optimal. Hal tersebut dibuktikan melalui koordinasi dari para pemangku kepentingan belum menjalankan sesuai dengan perannya.
2.	Sinergitas Pemerintah dan Swasta Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan  (La'lang et al., 2022)	Menganalisis hubungan sinergitas pemerintah dan swasta dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan	<b>Teori:</b> Teori sinergitas Najiyati dan Rahmat (2011)  <b>Metode:</b> Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dan swasta dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Toraja sudah cukup baik. Hal tersebut didukung oleh peran pemerintah dalam aspek komunikasi yang dilakukan dengan pendekatan persuasif dengan semua <i>stakeholder</i> yang terlibat. Selain itu, bentuk koordinasi yang dilakukan, yaitu dengan hubungan atau interaksi secara langsung.
3.	Sinergitas Aktor <i>Pentahelix</i> dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata Berbasis Agrowisata Kampoeng Kopi  (Lestari, 2022)	Menganalisis sinergitas aktor <i>pentahelix</i> yang terlibat dalam pembangunan inklusif pariwisata berbasis agrowisata kampoeng kopi	<b>Teori:</b> Teori sinergitas menurut Covey (2004)  <b>Metode:</b> Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas aktor <i>pentahelix</i> yang terlibat dalam pembangunan inklusif agrowisata kampoeng kopi sudah berjalan dengan baik diukur melalui indikator komunikasi dan koordinasi. Namun koordinasi yang dilakukan oleh aktor akademisi belum berjalan dengan baik dengan aktor lain yang terlibat salah satunya, yaitu koordinasi dengan masyarakat.

4.	<p>Kolaborasi dan Sinergitas Antar <i>Stakeholder</i> dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata di Kebun Raya Cibinong</p> <p>(Mahardhika Berliandaldo, dkk., 2021)</p>	<p>Menganalisis peran antar <i>stakeholder</i> dalam pembangunan berkelanjutan di Kebun Raya Cibinong</p>	<p><b>Teori:</b> Teori hubungan kolaboratif aktor menurut Wanna (2008) <b>Metode:</b> Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing <i>stakeholder</i> dapat mempercepat proses pembangunan sektor pariwisata yang dilakukan di Kebun Raya Cibinong. Dampak dari adanya pembangunan dan pengembangan Kebun Raya Cibinong dapat terlihat dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal yang paling jelas terlihat adalah adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi sekitar kawasan Kebun Raya Cibinong.</p>
5.	<p>Sinergitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rekan Hulu dengan <i>The Caretaker</i> dalam Pengembangan Objek Wisata Suligi Hill</p> <p>(Irdayanti &amp; Anggun Pangestuti, 2020)</p>	<p>Menganalisis hambatan dalam proses pengembangan objek wisata Suligi Hill</p>	<p><b>Teori:</b> Teori komunikasi dan koordinasi <i>stakeholder</i> menurut Rahmawati (2014) <b>Metode:</b> Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 3 kendala dalam proses pengembangan objek wisata Suligi Hill, yaitu sarana dan prasarana, anggaran, serta sumber daya manusia. Selain itu belum terdapat kerjasama dengan pihak swasta, sehingga pengembangan objek wisata Suligi Hill belum maksimal.</p>
6.	<p>Sinergitas Aktor dalam Pengembangan Desa Wisata Okura di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbaki Pesisir Kota Pekanbaru</p> <p>(Rakamdani, 2019)</p>	<p>Mengetahui sinergitas aktor dalam pengembangan Desa Wisata Okura di Kecamatan Rumbaki Pesisir, Kota Pekanbaru</p>	<p><b>Teori:</b> Teori sinergitas menurut Najiyati dan Rahmat (2011) <b>Metode:</b> Kualitatif deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas para aktor sudah berlangsung namun belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari cara komunikasi dan koordinasi dari pihak Disbudpar Kota Pekanbaru jarang melakukan kunjungan sehingga menghambat koordinasi antara sektor swasta, masyarakat, serta pmda melalui Disbudpar Kota Pekanbaru.</p>
7.	<p>Sinergi <i>Stakeholder</i> dalam</p>	<p>Mengetahui peran <i>stakeholder</i></p>	<p><b>Teori:</b> Teori <i>stakeholder</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan <i>stakeholder</i> yang terlibat di desa wisata Baha,</p>

	Mewujudkan Aktivitas Pariwisata di Desa Wisata Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung  (Lena Haryanti & Spto Nugroho, 2018)	dalam pengelolaan Desa Wisata Baha Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	menurut Pitana dan Gayatri serta teori fungsionalisme struktural menurut Sunyoto Usman (2012)  <b>Metode:</b> <i>Mix method</i>	yang terdiri dari: (1) Pemerintah (Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan Dinas Desa Baha); (2) Pengelola usaha pariwisata, berasal dari masyarakat setempat yang menjadikan rumahnya sebagai <i>homestay</i> ; dan (3) masyarakat setempat berperan dalam daya tarik wisata yang dikoordinir oleh Pokdarwis, dapat dikatakan bahwa sinergi antar <i>stakeholder</i> pariwisata di desa wisata Baha belum maksimal.
8.	<i>Governance Challenges of Cocoa Partnership Projects in Indonesia : Seeking Synergy in Multi-Stakeholder Arrangements For Sustainable Agriculture</i>  (Atika Wijaya, dkk., 2018)	Menganalisis peran multi-aktor dalam produksi coklat secara berkelanjutan di Indonesia	<b>Metode:</b> Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kerjasama antara pemerintah, NGO melalui LSM, swasta, dan masyarakat dalam kolaborasi produksi coklat belum berjalan dengan baik. Namun demikian, adanya inisiatif kemitraan Indonesia yang bersifat <i>bottom-up</i> , khususnya antara produsen, Lembaga penelitian, pemerintah daerah, dan pedagang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial petani Indonesia.
9.	<i>Adaptive Governance Features from Stakeholder Issues in Lake Limboto Management</i>  Muhammad Firyal Akbar, et al (2021) (Akbar et al., 2021)	Mengkaji aspek-aspek adaptif pemerintahan dari isu masing-masing pemangku kepentingan dalam pengelolaan Danau Limboto	<b>Metode:</b> Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya revitalisasi, rehabilitatif dan konservasi bukan hanya tugas pemerintah semata, namun memerlukan peran masyarakat di dalamnya. Kondisi sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam upaya penyelamatan dan pengelolaan Danau Limboto sangat diharapkan untuk mencapai tujuan pemerintahan adaptif dalam hal ketahanan terhadap perubahan lingkungan yang cepat dan tidak terduga.

## 1.5.2. Kajian Teori

### 1.5.2.1. Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (dalam Astuti et al., 2020 : 20) adalah proses sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Seiring berjalannya waktu, konsep administrasi publik mengalami pergeseran paradigma. Adapun pergeseran paradigma administrasi publik menurut Nicolas Henry (dalam Astuti et al., 2020 : 22) adalah sebagai berikut:

1. *The Politics – Administration Dichotomy* (1900 – 1926)

Paradigma pertama berusaha memisahkan politik dan fungsi pemerintahan sebagai bentuk strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Paradigma ini memberikan landasan yang kuat terhadap teori administrasi publik dengan berusaha membedakan antara fakta dan nilai.

2. *The Principles of Administration* (1927 – 1937)

Menurut Gulick dan Urwick (dalam Astuti et al., 2020 : 23) ada tujuh prinsip administrasi meliputi *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting*. Paradigma ini berfokus pada prinsip-prinsip administrasi yang dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya.

3. *Public Administration as Political Science* (1950 – 1970)

Henry melihat adanya keinginan yang kuat oleh ilmuwan politik untuk merebut kembali administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik.

Paradigma ini mengimplementasikan upaya untuk membangun kembali hubungan konseptual administrasi untuk bertemu induk ilmunya, yaitu ilmu politik, sebagai hasil dari perubahan dan pembaruan.

#### 4. *Public Administration as Management* (1956 – 1970)

Paradigma keempat, yaitu administrasi publik sebagai manajemen yang berpandangan bahwa administrasi publik sebagai bagian dari ilmu manajemen. Pada paradigma ketiga dan keempat, dua disiplin keilmuan, yakni politik dan manajemen bersaing menempatkan diri paling berhak mengakui bagian keilmuan dari administrasi publik.

#### 5. *Public Administration as Public Administration* (1970 – sekarang)

Paradigma ini lebih dikenal dengan “*new publik management*” (NPM). Pada periode ini, administrasi publik ditegakkan sebagai bidang studi keilmuan yang otonom. Fokus dari paradigma ini berada pada hierarki, birokrasi bergeser ke pasar dan organisasi sektor swasta yang bergeser ke model NPM. NPM memindahkan manajemen sektor publik ke arah sektor swasta dengan konsep model bisnis.

#### 6. *Governance* (1990 – sekarang)

Menurut Tamayao (dalam Astuti et al., 2020 : 25) *Governance* didefinisikan sebagai pelaksanaan otoritas oleh pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara. Pada dasarnya, “*governance*” melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kemitraan ini termasuk melibatkan penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik maupun swasta.

Administrasi publik menjadi *grand theory* dalam penelitian ini karena berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu terkait sinergitas *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah sebagaimana pengelolaan dan pengembangannya berada dilakukan oleh pemerintah sebagai *stakeholder* kunci. Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik membutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan melibatkan kemitraan bersama pemerintah desa, swasta, dan masyarakat setempat. Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan paradigma administrasi publik keenam dari Nicholas Henry yaitu *governance* bahwa pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya yang dalam penelitian ini yaitu mengembangkan objek wisata Pantai Purwahamba Indah melibatkan berbagai *stakeholder* sebagai implementor mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan.

#### **1.5.2.2. Governance**

Menurut Roderick Arthur W. Rodhes (dalam Astuti et al., 2020 : 32) mengatakan bahwa definisi *governance* adalah perubahan suatu tata kelola pemerintahan yang memiliki lingkup lebih luas meliputi terbentuknya suatu pengaturan proses yang baru, kaidah pengaturan yang mengalami perubahan menyesuaikan kondisi, serta munculnya sebuah metode baru untuk mengatur masyarakat, sedangkan menurut UNDP (dalam Aksa, 2018 : 130) *governance* adalah pengimplementasian kegiatan pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa seperti wewenang politik, administrasi, dan ekonomi.

Berdasarkan definisi dari berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa konsep *governance* merujuk pada tata kelola pemerintahan yang memiliki jangkauan

lebih luas bahkan sampai ke tingkat yang paling kecil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat dibutuhkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Pelaksanaan *good governance* melibatkan 3 aktor penting yang harus saling bersinergi yaitu negara (*state*), masyarakat, dan sektor swasta (*private sector*). Dengan demikian, pemerintah bukan lagi pilar tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun fasilitator yang membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* untuk saling melengkapi keterbatasan yang ada.

Governance menjadi *grand theory* dalam penelitian ini sesuai dengan paradigma administrasi publik keenam bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahannya yang salah satunya yaitu pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan, pemerintah membutuhkan kemitraan dengan swasta dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Sinergitas dan kolaborasi sebagai jalan tengah pemerintah dalam mengatasi permasalahan publik dan merumuskan kebijakan agar sesuai dengan sasaran serta mencapai kesepakatan dan pengambilan keputusan. Begitu juga dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah, dibutuhkan pelaksanaan *governance* yang baik melalui kolaborasi dan sinergi antar *stakeholder* untuk mencapai tujuan pengembangan wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

### **1.5.2.3. Kolaborasi**

Kolaborasi menurut Saleh (2021:5) adalah suatu pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu atau kelompok yang terlibat untuk saling berbagi

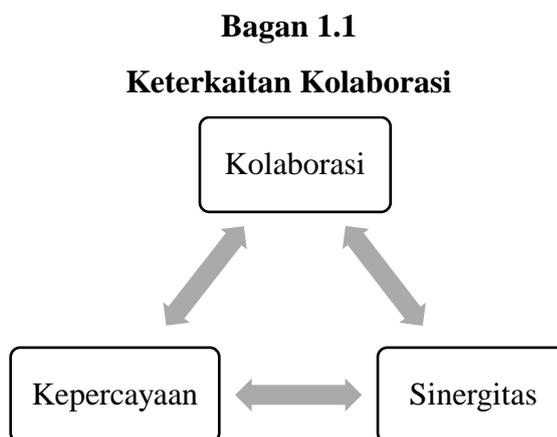
informasi, berpartisipasi penuh, mencapai kesepakatan, dan kegiatan pengambilan keputusan untuk mencapai keputusan bersama. Menurut buku yang berjudul *Stakeholder Collaboration “Building Bridges for Conservation”* yang diterbitkan oleh *World Wildlife Funding* (dalam Sari & Sitorus, 2021 : 1491) dijelaskan bahwa kolaborasi adalah bentuk kerja sama yang menitikberatkan pada indikator kepercayaan, inklusi, dan keterlibatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sejalan dengan pendapat buku yang diterbitkan *World Wildlife Funding*, Carpenter (dalam Sari & Sitorus, 2021 : 1492) menyebutkan bahwa terdapat 7 karakteristik dalam kolaborasi, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi yang bersifat inklusif (tidak dibatasi);
2. Tujuan yang jelas;
3. Bertanggung jawab dalam keberhasilan mencapai tujuan;
4. Keterbukaan dalam berbagi informasi;
5. Mengetahui perkembangan informasi;
6. Berbagai peran dan tanggung jawab dalam berbagai kesepakatan;
7. Memberikan berbagai pilihan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Kolaborasi terbentuk dari interaksi, kompromi, dan kerjasama dari berbagai elemen yang terlibat baik individu, organisasi, atau Lembaga (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2014 : 18). Keberhasilan sebuah kolaborasi juga tidak lepas dari peran masing-masing *stakeholder* yang terlibat (Rozikin & Ap, 2019 : 51). Keterlibatan *stakeholder* adalah kunci keberhasilan kolaborasi. *Stakeholder* yang menjalankan perannya dengan optimal dapat memudahkan sebuah kolaborasi mencapai tujuan yang diharapkan. Peran

*stakeholder* menjadi faktor penting dalam membangun sebuah kolaborasi. Untuk membangun sebuah kolaborasi yang baik diperlukan identifikasi peran dari *stakeholder* yang terlibat (Rahman & Warsono, 2019 : 29).

Definisi kolaborasi menurut Sarundajang (dalam Azhari, 2017 : 128) adalah suatu proses mendasar yang terbentuk dari kerja sama dan kemudian menghasilkan kepercayaan, sinergi, dan terobosan melalui pencapaian, kepemilikan dan keterpaduan atau kesinergian antar semua aspek organisasi yang terlibat.



*Sumber: Teori Sarundajang (dalam Azhari, 2017:128)*

Bagan 1.1 di atas diperoleh dari definisi kolaborasi menurut Sarundajang (dalam Azhari, 2017:128) bahwa kolaborasi, sinergitas, dan kepercayaan saling berkaitan. Untuk membangun kolaborasi dibutuhkan suatu sinergitas *stakeholder* yang terlibat dan kepercayaan dari *stakeholder* untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya. Untuk membangun sebuah sinergitas maka dibutuhkan hubungan timbal balik antara kepercayaan dan kolaborasi atau kerjasama *stakeholder*.

Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan berbagai pihak yang berorientasi pada terciptanya kepercayaan, partisipasi atau keterlibatan, dan sinergitas. Kepercayaan menurut Nawawi (2012 : 21) adalah suatu keadaan apabila seluruh *stakeholder* yang terlibat memiliki persepsi tertentu untuk menciptakan hubungan mutualisme atau saling menguntungkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan atau program, dibutuhkan kepercayaan dari semua pihak atau *stakeholder* yang terlibat baik pemerintah, sektor privat (swasta), maupun masyarakat. Menurut Nawawi (2012 : 23) terdapat 6 pilar untuk membangun kepercayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi

Partisipasi dimaknai bahwa semua *stakeholder* baik masyarakat maupun sektor privat dilibatkan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung dan tidak langsung sehingga tidak hanya pemerintah yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan, namun semua *stakeholder* diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan berpartisipasi secara konstruktif. Hal tersebut dapat membangun rasa kepercayaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan atau program.

2. Penegakan hukum

Dalam perumusan kebijakan atau kegiatan dibutuhkan sistem dan aturan hukum yang kuat. Regulasi dibutuhkan untuk menghindari adanya partisipasi *stakeholder* dari proses politik yang anarkis. Penegakan hukum yang kuat, konsisten, dan adil akan membangun kepercayaan *stakeholder*

terhadap pemerintah sebagai regulator dan fasilitator sebuah kebijakan atau program.

### 3. Transparansi

Untuk membangun kepercayaan maka semua *stakeholder* yang terlibat mampu bertanggung jawab terhadap perannya. Untuk mewujudkan pertanggung jawaban tersebut dilakukan dengan prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi berarti seluruh *stakeholder* yang terlibat dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah mengenai proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil.

### 4. Responsif

Pemerintah sebagai fasilitator harus memiliki prinsip responsif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan atau program. Responsif berarti pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Tidak hanya pemerintah saja, responsif wajib dilakukan oleh semua *stakeholder* yang terlibat. Oleh karena itu, sikap responsif antar *stakeholder* dapat membangun kepercayaan dalam pelaksanaan program.

### 5. Kesetaraan dan keadilan

Kesetaraan dan keadilan dimaknai dengan memberikan peluang, kesempatan, perlakuan, dan pelayanan yang sama antar individu atau kelompok. Kesetaraan dan keadilan dalam mendapatkan haknya dapat membangun kepercayaan dari semua *stakeholder* yang terlibat.

## 6. Akuntabilitas

Akuntabilitas dimaknai dengan kewajiban *stakeholder* dalam memberikan pertanggung jawaban atas perannya sehubungan dengan keterlibatannya dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari timbulnya benturan kepentingan antar *stakeholder*.

Kepercayaan yang terbangun secara baik antar *stakeholder* dapat mendorong keberhasilan kolaborasi. Hal tersebut didukung pendapat Ansell & Gash (dalam Rozikin & Ap, 2019 : 51) yang menyebutkan bahwa proses kolaborasi didukung oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi antar-muka
2. Kepercayaan
3. Komitmen
4. Keselarasan pemahaman

Kepercayaan menjadi salah satu hal yang krusial untuk membangun kolaborasi yang baik. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, kepercayaan juga berkaitan dengan sinergitas. Kepercayaan yang dibangun secara baik juga dibutuhkan untuk membangun sinergitas antar *stakeholder* dalam pelaksanaan program.

Sinergitas menurut Stephen Covey (2004 : 49) adalah proses saling melengkapi antar pihak yang terlibat terhadap perbedaan-perbedaan yang ada untuk mencapai output yang lebih besar dengan melalui kepercayaan semua unsur. Sejalan dengan konsep tersebut, Covey (2004 : 50) berpendapat bahwa terdapat 5 hal yang dapat membangun sinergitas sebagai berikut:

1. Berorientasi pada hasil yang signifikan dan konstruktif.
2. Menggabungkan berbagai perspektif yang ada.
3. Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
4. Kepercayaan.
5. Kesepakatan.

Berdasarkan pendapat Covey tersebut, faktor yang dapat membangun sinergitas salah satunya, yaitu kepercayaan dan kerja sama. Apabila teori sinergitas menurut Covey dielaborasi dengan teori kolaborasi menurut Sarundajang dan teori kepercayaan menurut Nawawi dapat menghasilkan sebuah keterkaitan yang mana mendukung bagan 1.1 yang menunjukkan diagram keterkaitan kolaborasi, kepercayaan, dan sinergitas. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan untuk mencapai hasil yang maksimal. Begitu pula dengan sinergitas dilaksanakan dengan berorientasi pada keberhasilan output yang lebih optimal.

Sinergitas dibangun untuk memadukan perbedaan-perbedaan yang timbul antar *stakeholder* yang terlibat agar dapat menyelaraskan tujuan dan menghasilkan output yang lebih baik. Berdasarkan elaborasi konsep tersebut dapat diketahui bahwa kolaborasi tidak terlepas dari peran semua *stakeholder* yang terlibat baik antar sektor maupun lintas sektor didukung melalui kepercayaan dan sinergisme.

Untuk membangun kepercayaan antar *stakeholder* dibutuhkan komunikasi dan komitmen dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat. Peran *stakeholder* menjadi kunci dalam keberhasilan suatu kolaborasi dibangun melalui

kesinergian antar *stakeholder* yang dilakukan dengan komunikasi dan komitmen dari masing-masing *stakeholder* (Rozikin & Ap, 2019 : 51). Apabila kolaborasi *stakeholder* dikaitkan dengan pengembangan wisata maka berhubungan dengan kebutuhan dan harapan untuk menjadikan wisata sebagai potensi unggulan daerah sehingga pengembangan wisata membutuhkan suatu sinergitas dan partisipasi *stakeholder* dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk mengenalkan serta mendukung potensi unggulan daerah melalui objek wisata kepada masyarakat luas.

#### **1.5.2.4. Sinergitas**

Konsep kolaborasi menurut Sarundajang (dalam Azhari, 2017 : 128) menyatakan bahwa sinergitas adalah suatu bagian dari proses kolaborasi. Untuk menuju keberhasilan sinergitas maka dibutuhkan kolaborasi antar *stakeholder* yang terlibat untuk menciptakan output yang maksimal. Sinergitas memiliki hubungan erat dengan kolaborasi untuk mencapai keterpaduan berbagai *stakeholder* yang terlibat. Kata sinergitas berasal dari kata sinergi yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti kegiatan gabungan. Menurut Richard L. Draft (dalam Manggalou, 2022 : 579) sinergitas adalah interaksi yang dilakukan beberapa bagian dalam suatu organisasi untuk menciptakan dampak yang lebih besar dari sekadar individualitas.

Definisi sinergitas menurut Thoby Mutis (dalam Ningrum, 2019 : 32) adalah perpaduan beberapa elemen yang bilamana dipadukan secara bersama akan memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Stephen Covey (2004 : 49) dalam bukunya yang berjudul *The Seven Habits of Highly Effective People*,

sinergitas adalah proses saling melengkapi antar pihak yang terlibat terhadap perbedaan-perbedaan yang ada untuk mencapai output yang lebih besar. Sedangkan definisi sinergitas menurut Najiyati dan Rahmat (dalam Irdiyanti & Pangestuti, 2020 : 3) yaitu diartikan sebagai perpaduan unsur atau bagian untuk menghasilkan output yang lebih baik dan lebih besar.

Untuk mencapai suatu sinergitas antar *stakeholder* membutuhkan suatu strategi yang bisa mendorong keberhasilan kesinergian. Menurut Covey (2004 : 52) terdapat 5 hal yang membentuk terjadinya sinergitas, yaitu sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Covey (2004 : 53) berpendapat bahwa kepercayaan merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak namun memiliki dampak yang signifikan dalam membangun sinergitas. Kepercayaan didefinisikan Covey (2004:53) sebagai sesuatu yang benar, baik dari tindakan maupun ucapan dilakukan sesuai dengan harapan yang ada (kredibel). Kepercayaan yang kuat antar *stakeholder* dapat merekatkan hubungan antar *stakeholder* menjadi lebih solid dan mendorong terciptanya interaksi yang baik dan positif.

2. Kesepakatan

Kesepakatan didefinisikan Covey (2004:53) sebagai suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan pernyataan semua pihak yang ada. Kesepakatan dilakukan untuk menghindari adanya ketimpangan atau konflik dalam kerja sama. Kesepakatan juga diartikan sebagai komitmen untuk melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan bersama. Komitmen ini

menjembatani para unsur untuk bersikap tanggung jawab terhadap apa yang akan dan telah dilakukan.

### 3. Kesamaan Tujuan

Dalam membangun sinergitas dibutuhkan suatu kesamaan tujuan untuk menyelaraskan kegiatan dan program sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai. Tujuan menurut Covey (2004 : 53) didefinisikan sebagai sasaran dari berbagai kepentingan oleh masing-masing *stakeholder* yang terlibat. Untuk menciptakan kesinergian, maka para *stakeholder* harus menyelaraskan kepentingan bersama dengan mengutamakan tujuan bersama yang telah ditetapkan untuk menghindari adanya benturan kepentingan. Tujuan yang baik adalah tujuan yang mampu terealisasikan dengan maksimal.

### 4. Berorientasi pada hasil yang signifikan dan konstruktif

Sinergitas pada dasarnya didefinisikan oleh Covey (2004 : 49) perpaduan unsur yang berorientasi pada output yang optimal. Dengan demikian, untuk membangun suatu sinergitas antar *stakeholder* juga memusatkan pada hasil yang bertujuan menciptakan output yang maksimal dan bersifat konstruktif

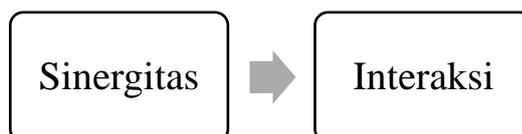
### 5. Menggabungkan berbagai perspektif yang ada

Untuk memadukan berbagai unsur, terdapat berbagai kepentingan dan perspektif yang berbeda. Dengan demikian untuk menciptakan suatu sinergitas, dibutuhkan suatu keterbukaan adanya perbedaan perspektif untuk menghormati dan menciptakan toleransi terhadap suatu perbedaan.

Dengan keterbukaan inilah, antar unsur atau *stakeholder* dapat menerima perbedaan yang ada dengan menilai secara subjektif perspektif-perspektif yang ada.

Strategi tersebut yang mendorong terbentuknya sinergitas antar *stakeholder* untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal. Sinergitas *stakeholder* menjadi alternatif yang mendasari terwujudnya implementasi program pemerintah. Sinergitas membutuhkan integrasi semua fungsi organisasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan yang bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan program/kegiatan. Untuk mengintegrasikan kegiatan dalam mencapai kesinergian *stakeholder*, dibutuhkan interaksi masing-masing aktor yang terlibat yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sesuai dengan perannya (Irdyanti & Pangestuti, 2020 : 3).

**Bagan 1.2**  
**Keterkaitan Sinergitas**



*Sumber: Teori Pamudji (dalam Pramono & Kinasih, 2019:307)*

Menurut Pamudji (dalam Pramono & Kinasih, 2019 : 307) sinergitas pada hakikatnya adalah bentuk interaksi dua aktor atau lebih yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rakamdani (2019 : 2) juga menyebutkan bahwa sinergitas adalah proses interaksi masing-masing aktor dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya melalui koordinasi untuk menciptakan hasil yang lebih optimal. Sejalan dengan konsep tersebut, Ritzer (dalam Lestari, 2022) menyebutkan bahwa interaksi secara substansial terjadi

ketika dua orang atau lebih bertemu saling berbincang, berkomunikasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan berkoordinasi mengenai tujuan yang sama. Hurlock (dalam Sari, 2020) menyebutkan bahwa interaksi memiliki komponen utama, yaitu sebagai berikut:

1. Percakapan
2. Saling pengertian/percaya
3. Kerjasama
4. Keterbukaan
5. Berempati
6. Motivasi
7. Kesamaan tujuan

Berdasarkan definisi sinergitas menurut para ahli, konsep sinergitas adalah proses kolaborasi yang memadukan berbagai unsur atau elemen melalui interaksi yang terjalin dari masing-masing *stakeholder* untuk mencapai hasil atau output yang lebih baik. Peneliti kemudian mengelaborasi indikator interaksi menurut Hurlock serta teori sinergitas menurut Najiyati dan menurut Covey yang mana untuk mencapai kesinergian membutuhkan interaksi yang baik antar aktor. Berdasarkan elaborasi tersebut maka sinergitas dapat terbangun melalui dua cara, yaitu sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Menurut Sofyandi dan Garniwa (2007:44) menyebutkan definisi komunikasi adalah kegiatan menyampaikan informasi atau bertukar informasi antara pemberi pesan dan penerima pesan sebagai stimulus

individu atau kelompok untuk menyampaikan informasi atau pesan. Devito (2016 : 89) menjelaskan bahwa bentuk komunikasi terdiri dari komunikasi vertikal (komunikasi ke atas/komunikasi ke bawah) dan komunikasi horizontal atau komunikasi setara. Menurut teori Laswell dan Pratminingsih (dalam Laksono, 2018 : 5), terdapat 5 unsur untuk membangun sebuah komunikasi yang efektif, yaitu sebagai berikut:

a. *Source* atau sumber informasi

*Source* adalah komunikator atau yang pihak yang menyampaikan pesan. Komunikator meliputi individu, kelompok, organisasi, instansi, dll.

b. *Encoding*

*Encoding* adalah proses menerjemahkan dan memahami simbol-simbol dari pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan.

c. Media

Media sebagai alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Media dapat berupa surat, telepon, *workshop*, rapat, platform *meeting online*.

d. *Feedback* atau respon

*Feedback* adalah respon dari penerima pesan yang diberikan kepada pengirim pesan. *Feedback* dapat berupa persetujuan (pro) atau tidak setuju (kontra) terhadap informasi yang telah diterima.

e. *Noise* atau hambatan

*Noise* adalah hal-hal yang dapat menghambat berjalannya komunikasi.

Bentuk hambatan tersebut dapat berupa verbal, nonverbal, fisik, atau lingkungan.

Berdasarkan teori komunikasi menurut Sofyandi dan Garniwa (2007:54), komunikasi dapat dibangun melalui 2 hal, yaitu sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan *stakeholder* dalam mengambil keputusan dalam melakukan tindakan dan menerima risiko yang dapat terjadi.

b. Kontribusi atau Partisipasi

Kontribusi adalah keterlibatan *stakeholder* dalam memberikan informasi pada setiap kegiatan.

Menurut Devito (2016 : 91) mengemukakan 3 hal yang dapat membangun komunikasi secara efektif sebagai berikut:

a. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan menurut Sari (2014:21) didefinisikan sebagai suatu kemudahan untuk mendapatkan atau mengakses semua informasi sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut Devito (2016: 92), keterbukaan didefinisikan sebagai sikap kesediaan seseorang secara sukarela membuka diri untuk menyampaikan informasi dan menanggapi informasi yang diterima. Keterbukaan adalah kejujuran (*honesty*) yang harus dijunjung tinggi dalam melakukan koordinasi.

b. Kepercayaan (*Credibility*)

Kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan seseorang dalam merealisasikan harapan pihak lain sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

c. Dukungan atau Kontribusi (*Supportiveness*)

Dukungan adalah dorongan melalui pemberian semangat dalam suatu komunikasi agar tercipta hubungan yang suportif.

Berdasarkan kedua teori di atas, peneliti memilih untuk mengelaborasi kedua teori unsur komunikasi tersebut dengan fenomena yang digunakan yaitu *source*, media, kepercayaan, dan keterbukaan.

## 2. Koordinasi

Menurut Silalahi (dalam Irdyanti & Pangestuti, 2020 : 6) koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama, yaitu bekerja ke arah tujuan bersama. Untuk menciptakan sinergitas yang baik, selain faktor komunikasi juga diperlukan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi seperti 2 sisi koin yang berkaitan erat. Apabila salah satu dari aspek tersebut tidak berjalan dengan baik maka akan berdampak pula pada aspek lainnya yang terhambat. Menurut Moekijat (dalam Rakamdani, 2019 : 6) terdapat 8 (delapan) aspek yang dapat mewujudkan koordinasi lebih efektif, yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan langsung

Hubungan langsung berkaitan dengan interaksi interpersonal secara langsung yang mendorong tercapainya koordinasi. Hubungan langsung

interpersonal diartikan sebagai hubungan kerja melalui interaksi antar *stakeholder* yang bertujuan untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi.

2. Kontinuitas

Kontinuitas didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan dan berlangsung setiap waktu dari tahap satu ke tahap lainnya, seperti halnya tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi.

3. Dinamis

Dinamis yang dimaksudkan, yaitu perubahan konstan yang mempertimbangkan perubahan lingkungan internal maupun eksternal.

4. Tujuan yang jelas

Koordinasi membutuhkan tujuan yang jelas yang menjadi sasaran keberhasilan. Moekijat (dalam Rakamdani, 2019:6) tujuan yang jelas juga terlihat dari penetapan tujuan dan pelaksanaan tujuan.

5. Organisasi yang sederhana

Koordinasi yang efektif, dapat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang sederhana.

6. Perumusan wewenang dan tanggung jawab

Penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dapat menegaskan peran *stakeholder* yang terlibat untuk menciptakan keteraturan. Hal tersebut juga dapat mengurangi risiko timbulnya konflik atau pertentangan antar *stakeholder*. Wewenang dan tanggung jawab

didefinisikan Soerjono Soekanto (dalam Rakamdani, 2019 : 7) sebagai hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan kedudukannya.

#### 7. Komunikasi efektif

Komunikasi dan koordinasi sangat berkaitan erat, sehingga untuk menciptakan koordinasi yang efektif maka diperlukan komunikasi yang efektif.

#### 8. Kepemimpinan supervisi yang efektif

Moekijat (dalam Rakamdani, 2019:7) kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas bawahan yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawabnya. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat.

Berdasarkan indikator koordinasi menurut teori Moekijat, peneliti menggunakan 5 aspek pada penelitian ini yaitu hubungan langsung, kontinuitas, tujuan yang jelas, perumusan wewenang dan tanggung jawab.

#### **1.5.2.5. Faktor Yang Dapat Menghambat Sinergitas**

Rakamdani (2019: 12) menyebutkan bahwa terdapat 3 faktor yang dapat menghambat terlaksananya sinergitas, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana wisata menjadi modal pemerintah untuk mengembangkan program kepariwisataan untuk mendorong perekonomian daerah. Sarana dan prasarana sebagai salah satu unsur penunjang keberhasilan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan akan

terlaksana dengan baik apabila ketersediaan sarana dan prasarana tidak memadai.

## 2. Anggaran

Anggaran menurut Rakamdani (2019 : 13) adalah rencana terperinci kegiatan suatu organisasi dalam bentuk kuantitatif selama suatu periode tertentu. Ketersediaan anggaran yang sesuai dengan rencana pembangunan dapat mendorong pelaksanaan program secara maksimal.

## 3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi diri atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk keperluan pembangunan yang diukur melalui kualitas dan kuantitas (Rohana et al., 2016:20).

Menurut Muhadjir Darwin (dalam Ningrum, 2019 : 43) menyebutkan terdapat faktor yang menghambat terlaksananya sinergitas, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Ketidakjelasan tujuan

Tujuan yang tidak jelas arahnya dapat menghambat untuk mencapai suatu kesinergian antar *stakeholder*. Muhadjir Darwin (dalam Ningrum, 2019:43) menyebutkan bahwa hubungan kerja sama akan berjalan efektif apabila memiliki tujuan yang jelas dan telah disepakati secara bersama-sama. Dengan demikian, keberhasilan sinergitas membutuhkan arah tujuan yang jelas.

## 2. Sumber Daya

Kendala dalam mencapai sinergitas antar *stakeholder* salah satunya dipengaruhi oleh sumber daya yang kurang memadai. Kesinergian *stakeholder* dalam melaksanakan kegiatan, sangat berpengaruh dengan sumber daya yang ada. Baik sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, maupun teknologi untuk mendorong keberhasilan suatu pembangunan.

### a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi diri atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk keperluan pembangunan yang diukur melalui kualitas dan kuantitas (Rohana et al., 2016:20).

#### a) Kualitas

Kualitas sumber daya manusia menyangkut kemampuan seseorang dalam mempertanggung jawabkan peran yang dimilikinya. Kemampuan tersebut dapat berupa kemampuan intelektual, kemampuan fisik dan psikologis.

#### b) Kuantitas

Kuantitas berhubungan dengan angka atau jumlah pihak yang terlibat atau berkontribusi dalam pembangunan.

### b. Sumber daya finansial atau anggaran

Terlaksananya suatu pengelolaan dan pengembangan pariwisata tidak terlepas dari sumber daya anggaran. Ketersediaan anggaran menjadi faktor

penunjang segala bentuk program pemerintahan sebagai pelayan masyarakat dan sebagai aktor kepentingan dalam pengembangan pariwisata.

c. Sarana dan prasarana

Menurut Soekadijo (dalam Sumarabawa, 2018 : 3) prasarana adalah semua fasilitas berupa sumber daya alam maupun manusia yang dibutuhkan masyarakat untuk mendorong kelancaran proses perekonomian. Prasarana wisata adalah fasilitas yang ada di objek wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Prasarana wisata ini berupa jalan, listrik, air, telekomunikasi, dan prasarana pendukung lainnya. Sarana menurut Gamal Suwanto (dalam Sumarabawa, 2018 : 3) adalah fasilitas yang melengkapi objek wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan. Sarana menjadi fasilitas penunjang prasarana dalam mengunjungi suatu objek wisata.

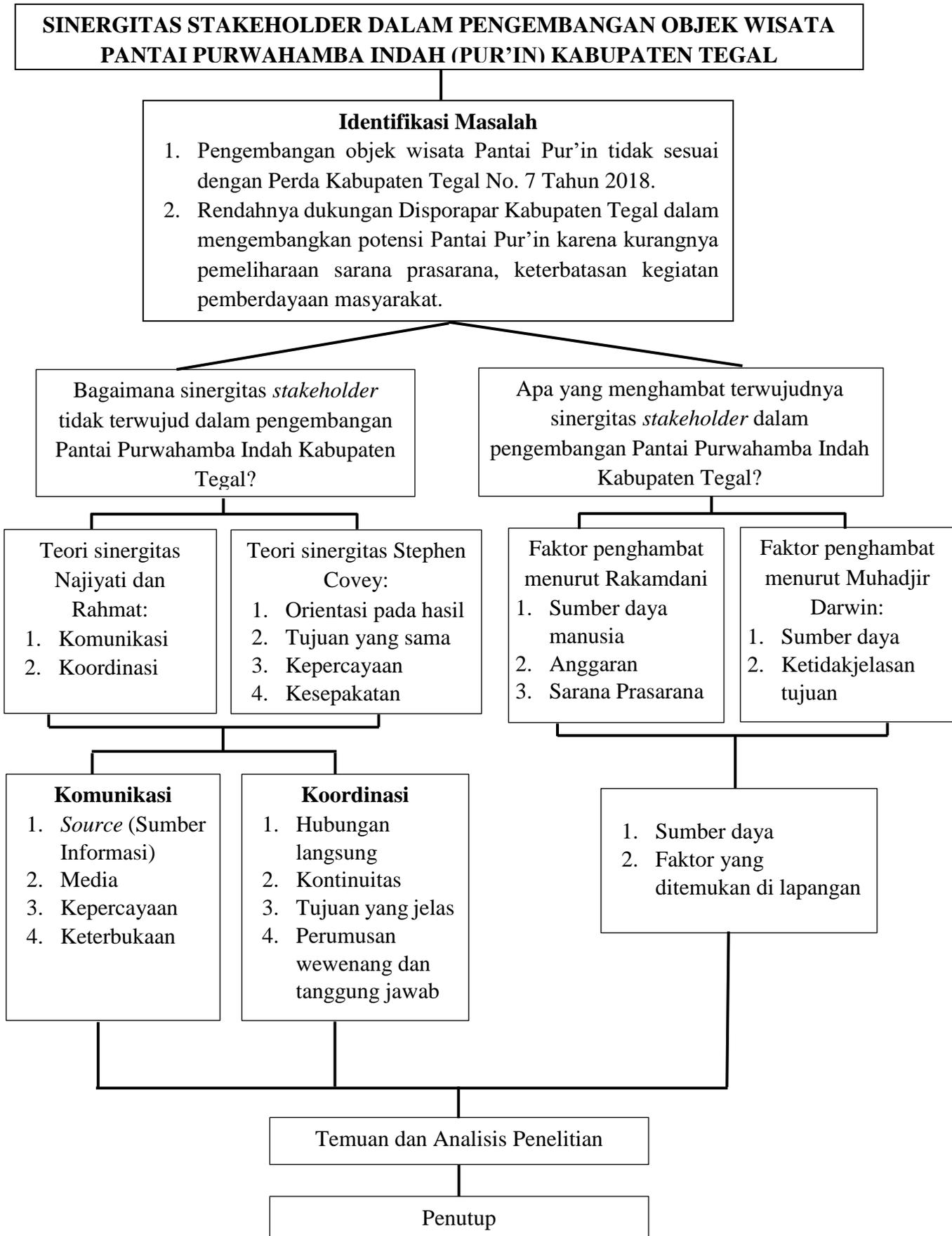
Berdasarkan pemaparan faktor penghambat sinergitas di atas, peneliti mengelaborasi faktor yang dapat menghambat terwujudnya sinergitas yang dikemukakan oleh Muhadjir Darwin dan Rakamdani, yaitu sumber daya.

#### **1.5.2.6. Pengembangan Pariwisata**

Yoeti (dalam Rakamdani, 2019 : 7) memaknai kata pengembangan merupakan bertambah, sempurna, merata, meluas dan sebagainya. Pengembangan objek wisata didefinisikan sebagai upaya untuk mewujudkan sesuatu untuk menjadi lebih baik dengan berbagai sumber daya dengan tujuan meningkatkan daya tarik wisata dan meningkatkan jumlah wisatawan untuk berkunjung. Upaya untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kepariwisataan, yaitu:

- a. Merealisasikan upaya untuk meningkatkan daya tarik objek wisata baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Mendukung kegiatan pariwisata dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana.
- c. Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat lokal objek wisata dan bekerja sama dengan pihak swasta.

### 1.5.3. Kerangka Berpikir Penelitian



## 1.6. Fenomena Penelitian

Sinergitas dalam penelitian ini, yaitu berkaitan sinergitas *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal sebagai objek wisata pesisir unggulan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat. Adapun fenomena penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, menggunakan 2 kriteria sinergitas, yaitu sebagai berikut:

- a. **Komunikasi**

Komunikasi dianalisis menggunakan sub kriteria sebagai berikut:

1. *Source* atau sumber informasi
  - *Stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal.
  - Bentuk penyampaian informasi melalui hubungan atas-bawah atau bawah-atas.
2. *Media*
  - Komunikasi langsung (tatap muka) melalui rapat, *workshop*.
  - Komunikasi tidak langsung melalui surat, email, platform media sosial lain.
3. Kepercayaan
  - Kesesuaian informasi berdasarkan fakta di lapangan.
  - Kesiediaan untuk memberikan dan menerima informasi sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

#### 4. Keterbukaan

- Transparansi *stakeholder* dalam memberikan informasi berkaitan dengan pengembangan wisata Pantai Purwahamba Indah.
- Keakuratan pesan atau informasi yang disampaikan dalam melaksanakan komunikasi baik dalam bentuk isu, permasalahan, atau kepentingan tertentu yang bersifat objektif, jelas, dan faktual.

#### **b. Koordinasi**

Koordinasi dianalisis melalui sub kriteria sebagai berikut:

##### 1. Hubungan langsung

- Hubungan interpersonal antar *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah.

##### 2. Kontinuitas

- Keberlanjutan dan konsistensi koordinasi dalam upaya pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah.

##### 3. Tujuan

- Efektivitas dan efisiensi mencapai sasaran program dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah.
- Kesesuaian pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah dengan tujuan yang telah disepakati

##### 4. Perumusan wewenang dan tanggung jawab

- Pembagian tugas sesuai dengan peran dan kepentingan *stakeholder*.

- Kemampuan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder* (profesional) dalam pengembangan wisata Pantai Purwahamba Indah.

#### 5. Kepemimpinan

- Kemampuan dan sikap pemimpin dalam koordinasi pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah.

2. Faktor penghambat sinergitas *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan untuk menganalisis faktor penghambat sinergitas yaitu sebagai berikut:

#### a. Sumber Daya

Sumber daya dianalisis melalui sub kriteria sebagai berikut:

##### 1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia diukur melalui sub-sub kriteria berikut:

###### a) Kuantitas

- Ketersediaan jumlah SDM pengelola objek wisata Pantai Purwahamba Indah.

###### b) Kualitas

- Kemampuan *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah
- Pengetahuan *stakeholder* terhadap peran dan tanggung jawabnya.

## 2. Sarana dan prasarana

- Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata Pantai Purwahamba Indah.
- Kesesuaian kondisi dan kelayakan sarana prasarana dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah.

### b. Faktor yang ada di lapangan

- Faktor yang ditemukan peneliti di lapangan

## 1.7. Argumentasi Penelitian

Pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah difasilitasi oleh pemerintah melalui Disporapar Kabupaten Tegal sebagai fasilitator, implementor, dan regulator, namun paa pelaksanaannya masih belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari berbagai fasilitas sarana prasarana yang masih belum memadai dan minimnya promosi wisata. Ditambah dengan kerja sama yang dibangun dengan PT Bintang Permata Kharisma justru masih terjebak dalam keadaan stagnasi padahal PT BPK adalah satu-satunya sponsor tunggal dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah. Selain dengan sektor swasta, Pokdarwis Pesona Bahari sebagai masyarakat lokal sebagai salah satu *stakeholder* yang penting dalam pengembangan objek wisata ternyata menurun tingkat kepedulian. Permasalahan yang muncul dapat disebabkan karena peran *stakeholder* yang belum dilaksanakan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti, yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Whitney (dalam Moelong, 2016) mendefinisikan tipe penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kehidupan sosial masyarakat dengan mendeskripsikan kehidupan sosial masyarakat dari prespektif informan. Metodologi ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul pada masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk di dalam hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang telah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan fenomena penelitian ini, yaitu berkaitan dengan sinergitas *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah yang mana data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini menekankan pada pendalaman analisis sesuai dengan fenomena penelitian yang berasal dari informan dan objek penelitian yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah tempat peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari suatu objek yang akan diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian. Untuk memperoleh data primer, maka penetapan situs penelitian adalah tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan maka penetapan situs penelitian adalah objek wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal. Alasan pemilihan situs penelitian ini dengan pertimbangan bahwa dari pengamatan peneliti terkait dengan pengembangan objek wisata yang memiliki peluang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus terkendala akibat kurangnya kerjasama dari berbagai pihak.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Moleong (2016:30) mendefinisikan bahwa subjek penelitian adalah informan dalam suatu penelitian, yang artinya orang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian secara riil. Adapun penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria yang terdapat pada tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka subjek dari penelitian ini meliputi keseluruhan aktor sektor publik dan aktor sektor swasta yang terlibat langsung dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal diantaranya, yaitu:

1. Kepala bidang pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal

Kabid pariwisata Disporapar Kabupaten Tegal dipilih sebagai informan dari pihak pemerintah karena peran dari bidang pariwisata, yaitu pada ranah pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Tegal termasuk Pantai Purwahamba Indah pada periode tahun 2019 – sekarang sehingga informan tersebut dipilih dalam penelitian ini karena sebagai *stakeholder* utama pemerintah yang terlibat dalam pengembangan Pantai Purwahamba Indah.

2. Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal

Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata merupakan bagian dari Disporapar sebagai *stakeholder* pihak pemerintah yang mempunyai peran pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Tegal termasuk Pantai Purwahamba Indah pada periode 2016 – sekarang. Kepala UPTD juga mengetahui kondisi lapangan semua objek wisata di Kabupaten Tegal dan memiliki kantor khusus di objek wisata Pantai Purwahamba Indah. Informan ini dipilih karena menjadi *stakeholder* yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pihak swasta.

3. Bendahara UPTD Pengelolaan Objek Wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal

Bendahara UPTD Pengelolaan Wisata juga merupakan bagian dari Disporapar sebagai *stakeholder* pihak pemerintah. Bendahara UPTD memiliki peran dalam soal *budgeting* pengelolaan dan pengembangan Pantai

Purwahamba Indah pada periode 2017 – sekarang. Bendahara UPTD juga ditugaskan di kantor UPTD yang terletak di objek wisata sehingga mengetahui kondisi lapangan semua objek wisata di Kabupaten Tegal dan juga berhubungan langsung dengan masyarakat serta pihak swasta termasuk di Pantai Purwahamba Indah.

4. Ketua Pokdarwis Pesona Bahari

Pokdarwis merupakan salah satu *stakeholder* yang semua anggotanya, yaitu masyarakat lokal Pantai Purwahamba Indah. Ketua Pokdarwis dipilih dalam penelitian ini karena memiliki peran menyalurkan aspirasi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah terkait pengembangan Pantai Purwahamba Indah.

5. Sekretaris Pokdarwis Pesona Bahari

Sekretaris Pokdarwis dipilih dalam penelitian ini karena sebagai penjaga tiket Pantai Purwahamba Indah yang memiliki peran dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah serta membantu Ketua Pokdarwis berkomunikasi dengan pemerintah dan masyarakat anggota pokdarwis. Sekretaris Pokdarwis juga merupakan masyarakat lokal Desa Purwahamba.

6. Anggota Pokdarwis Pesona Bahari

Sama halnya dengan dua informan pokdarwis di atas, anggota pokdarwis ini merupakan masyarakat lokal yang bermata pencaharian di Pantai Purwahamba Indah dan merupakan *stakeholder* pihak masyarakat yang memiliki peran penting dalam pengembangan Pantai Purwahamba Indah.

## 7. Bendahara PT Bintang Permata Kharisma

PT BPK merupakan *stakeholder* swasta yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan Pantai Purwahamba Indah. Bendahara PT BPK merupakan orang yang sama dari awal pengelolaan Pantai Purwahamba Indah bekerja sama dengan PT BPK sampai dengan sekarang. Bendahara PT BPK dipilih dalam penelitian ini karena mengetahui terkait dengan *budgeting* baik dalam investasi, pembayaran sewa lahan, dan kegiatan yang berinteraksi langsung dengan pemerintah.

Objek dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dengan para *stakeholder* terkait dengan penggunaan lahan, *budgeting*, hubungan timbal balik antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat, serta dampak dari adanya kemitraan sektor publik-swasta dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal.

### 1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan berupa kata verbal dan bukan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, yang termasuk data kualitatif meliputi gambaran umum mengenai objek penelitian yang meliputi: letak geografis objek, keadaan sarana dan prasarana, dan hasil wawancara sedangkan data kuantitatif, yaitu data numerik pada tabel.

## **1.8.5. Sumber Data**

### **1.8.5.1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian melalui wawancara dan hasil observasi. Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara kepada informan utama yang meliputi pengelola objek wisata dari Disporapar melalui bidang pariwisata dan UPTD DTW Pantai Purwahamba Indah, Pokdarwis, dan sektor swasta, yaitu PT BPK.

### **1.8.5.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti namun melalui pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran dan penelaahan literatur-literatur berupa artikel ilmiah, buku, berita *online*, penelitian terdahulu, regulasi Perda Kabupaten Tegal No. 7 Tahun 2018, media *online* maupun sumber kredibel yang reliabel sesuai dengan topik penelitian ini yaitu sinergitas *stakeholder* dalam pengembangan Pantai Purwahamba Indah di Kabupaten Tegal.

## **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian. Sugiyono (2015:52) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data sebagai tahapan yang strategis dalam penelitian karena sebuah penelitian memiliki tujuan utama untuk

mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan, yang kemudian dicatat atau direkam. Adapun dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan, yaitu wawancara langsung yang dilakukan secara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung pada pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah yang meliputi Disporapar, Pokdarwis, dan PT BPK. Wawancara dengan informan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan pengembangan Pantai Purwahamba Indah.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari fenomena yang dilakukan melalui indera untuk mendapatkan fakta-fakta di lapangan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi nonpartisipan tidak terstruktur yang dilakukan dengan cara mengamati kondisi nyata di lapangan, yaitu yang memperlihatkan output (bukti fisik) pengembangan objek wisata dari segi sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan di lingkungan wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal.

### 3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah salah satu teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, artikel ilmiah, regulasi, yang berkaitan permasalahan penelitian.

#### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dan menguraikan data yang bersifat kualitatif yang ditemukan di lapangan. Analisis data deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu bentuk analisis interaktif yang bertujuan untuk menghasilkan data yang komprehensif yang tidak bisa diukur secara statistik. Analisis interaktif ini dilakukan dengan melalui 3 tahapan meliputi reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan *interactive mode*.

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data, didefinisikan sebagai proses penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

##### 2. Penyajian Data

Penyajian data didefinisikan sebagai pendeskripsian dan penjabaran informasi yang telah didapatkan di lapangan, dengan kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, matrik, diagram, tabel dan bagan.

### 3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu memahami makna data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menyajikan informasi kepada pembaca untuk mengetahui secara jelas mengenai hasil akhir dari data yang telah disajikan. Tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi suatu rangkaian berurutan dalam menganalisis data yang ditemukan di lapangan.

Metode analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan metode analisis dimensional Buckingham (dalam Atmojo et al., 2014) dengan menganalisis fakta di lapangan dengan menggunakan variabel atau fenomena penelitian. Sebagaimana dalam penelitian ini, fakta yang ditemukan di lapangan terkait sinergitas pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah dianalisis menggunakan fenomena penelitian, yaitu komunikasi yang meliputi *source*, media, kepercayaan, serta keterbukaan dan koordinasi yang meliputi hubungan langsung, kontinuitas, tujuan, perumusan wewenang dan tanggungjawab.

#### **1.8.8. Kualitas Data**

Keabsahan data didefinisikan Sugiyono (2015:372) sebagai alat untuk mengukur kredibilitas atas data penelitian untuk dipertanggungjawabkan keabsahannya. Uji kualitas data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan uji triangulasi dengan mengukur dan membandingkan data

tersebut. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi data. Sugiyono (2015: 373) mengatakan bahwa triangulasi data dilakukan dengan mengukur dan membandingkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu menggunakan uji objektivitas dengan menguji kembali data yang didapat melalui diskusi dengan dosen pembimbing, dan menggunakan bahan referensi.